



**PELAKSANAAN PENGAWASAN NON TAHAPAN (ASN)  
PADA PEMILU TAHUN 2019**

## Pelaksanaan Pengawasan Non Tahapan (ASN)

*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum* menjelaskan Pejabat Negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil Negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Hal tersebut diatur pula pada *PKPU Nomor 23 Tahun 2018* yang menjelaskan pula larangan keterlibatan ASN berpihak pada salah satu peserta pemilu.

### 1. Pelaksanaan Pengawasan

#### a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Agenda penyelenggaraan Pemilihan Umum yang merupakan wadah demokrasi masyarakat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Prop, DPRD Kabupaten tentunya melekat pada sistim birokrasi pemerintahan, pemangku wilayah baik di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten berasal dari kader partai politik yang dipercaya.

Kerawanan – kerawanan yang terjadi dapat diuraikan tabel berikut :

Kader	Birokrasi	Sistem
Kepala Daerah merupakan kader partai yang dipercaya untuk memimpin daerah.	Kebijakan dan <i>policy</i> dari kepala daerah harus dilaksanakan oleh jajaran aparatur di wilayah.	Penyalahgunaan kewenangan atau " <i>abouse power</i> " mendominasi sistim birokrasi pemerintahan di wilayah.

#### b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyusun rencana terkait Netralitas ASN dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Melibatkan Kepala Daerah, Setda, serta Badan Kepegawaian Daerah selaku narasumber dalam kegiatan sosialisasi ke jajaran ASN.

Tentunya materi sosialisasi yang disampaikan terkait larangan keterlibatan ASN dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum, pemberian dukungan ke salah satu peserta pemilu, serta ikut dalam kegiatan kampanye salah satu partai politik peserta pemilu.

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum yang berjalan, dan jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar selalu melaksanakan koordinasi ke pemangku wilayah di setiap tingkatan.

## 2. Kegiatan Pengawasan

### a. Pencegahan

Upaya pencegahan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Karanganyar berpegang pada surat edaran yang dikeluarkan oleh Presiden, Gubernur dan Bupati selaku pemegang kebijakan. Setiap edaran yang terbit disampaikan kepada jajaran aparatur negara untuk dapat dilaksanakan, disampaikan pula ke peserta pemilu untuk dapat diketahui.

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran netralitas ASN juga disampaikan Bawaslu Kabupaten Karanganyar kepada jajaran aparatur negara, guna *efek jera* ASN dalam menjaga netralitas.

### b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Tempat Kegiatan	Waktu Kegiatan	Peserta Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu	Jawa Dwipa	Rabu, 6 Maret 2019	1. Taruna Merah Putih (PDIP) 2. Anak Muda Partai Golkar (Golkar) 3. Satria (Partai Gerindra) 4. Garda Bangsa (PKB)	50

				<p>5. Angkatan Muda Demokrat (Partai Demokrat)</p> <p>6. Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (PAN)</p> <p>7. Gema Keadilan (PKS)</p> <p>8. Pemuda Ka'bah (PPP)</p> <p>9. Gerakan Muda Nurani Rakyat (Hanura)</p> <p>10. Garda Pemuda Nasdem (Nasdem)</p> <p>11. Pemuda Garuda (Partai Garuda)</p> <p>12. Angkatan Muda Partai Berkarya (Partai Berkarya)</p> <p>13. Pemuda Perindo (Partai Perindo)</p> <p>14. Pemuda PSI (PSI)</p> <p>15. Pemuda PBB</p> <p>16. Pemuda PKPI</p>	
2.	Sosialisasi Pengawasan Pemilu	Jawa Dwipa	Kamis, 4 April 2019	<p>1. FKUB Kabupaten Karanganyar</p> <p>2. Persatuan Wredhatama Republik Indonesia (PWRI)</p> <p>3. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Karanganyar</p>	50

				4. KNPI Kabupaten Karanganyar	
				5. Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	
				6. Persit Kodim 0727 Kabupaten Karanganyar	
				7. Bhayangkari Kabupaten Karanganyar	
				8. Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) KID MINSTRY	
				9. Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar	
				10. PPRBM	
				11. RAPI GP Ansor Kabupaten Karanganyar	
				12. Organisasi MDMC	
				13. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU)	
				14. Paguyuban PKL Kabupaten Karanganyar	

### **3. Hasil-Hasil Pengawasan**

#### **a. Temuan**

Adanya Tenaga Harian Lepas Satpol PP Kabupaten Karanganyar, yang ikut dalam pelaksanaan pemasangan APK salah satu peserta pemilu.

#### **b. Rekomendasi**

Terkait dengan pelanggaran pemasangan APK oleh Tenaga Harian Lepas Satpol PP Kabupaten Karanganyar, Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengirim surat No.028/Bawaslu.Prop.JT-11/PM.06.02/III/2019 ke Satpol PP Kabupaten Karanganyar.

#### **c. Tindaklanjut Rekomendasi**

Satpol PP Kabupaten Karanganyar melakukan pembinaan terhadap Tenaga Harian Lepas yang telah melanggar hukum lainnya. Dengan mengirim surat No.331.1/310/SATPOL/IV/2019

### **4. Dinamika dan Permasalahan**

ASN selaku jajaran aparatur negara mempunyai tugas dan kewajiban melayani masyarakat secara umum terkait hal – hal yang menjadi kebutuhan masyarakat secara administratif. Kebijakan yang dilaksanakan berlaku secara vertikal, sesuai dengan arahan dan petunjuk kepala daerah. Hal ini berakibat, ASN sulit untuk menolak apa yang menjadi perintah kepala daerah.

*“Abouse power”* masih melekat pada pribadi kepala daerah dalam mengatur dan mengarahkan ASN di wilayahnya, demi tercapainya tujuan atau kepentingan yang kadang tidak masuk akal. Sehingga ASN merasa takut untuk menolak atau berontak ketika kebijakan yang dilaksanakannya harus dipenuhi. Kondisi ini sering berakibat pada netralitas ASN ketika harus dihadapkan pada satu pilihan, untuk ikut mendukung atau mengikuti kegiatan kampanye salah satu peserta partai politik.

### **5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan**

Koordinasi dan kebersamaan jajaran penyelenggara pemilihan umum dengan pemerintah daerah harus selalu terjaga hubungannya, guna memberikan pemahaman regulasi terkait netralitas ASN. Semua Aparatus Sipil Negara agar tetap menjaga korps lembaga atau kedinasan dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada dukungan salah satu peserta pemilu.